PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

BOS DAMI (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH MIMIKA)

1.2 Tahapan Inovasi

penerapan

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

opd

1.4 Jenis Inovasi

nondigital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

inovasi pelayanan publik

1.7 Urusan Inovasi Daerah

Pendidikan

1.8 Waktu Uji Coba

2023-01-10

1.9 Waktu Penerapan

2023-03-07

1.10 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 34 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Pada Satuan Pendidikan Pendidikan PAUD/TK Raudathul Alfal, Sekolah Dasar/ Madrasah Iptidaiyah, SMP Madrasah Tsanawiyah, SMA/Madrasah Aliyah, SMK dan Kesetaraan Tahun Anggaran 2023

II. PERMASALAHAN

Makro

Permasalahan makro terkait biaya sekolah yang tinggi mencakup isu-isu yang lebih luas dan mempengaruhi secara keseluruhan sistem pendidikan di suatu negara atau wilayah. Berikut adalah beberapa permasalahan makro yang sering muncul terkait biaya sekolah:

1. Keterbatasan Anggaran Pendidikan: Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan oleh pemerintah. Anggaran pendidikan yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan biaya sekolah yang tinggi, karena sekolah sering kali harus mengandalkan dana dari sumber lain atau meminta sumbangan tambahan kepada orang tua siswa.

2. Kesenjangan Akses Pendidikan: Biaya sekolah yang tinggi dapat menyebabkan kesenjangan dalam akses pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin atau daerah terpencil mungkin kesulitan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas jika biaya sekolah tidak terjangkau bagi keluarga mereka

3. Kualitas Pendidikan yang Bervariasi: Biaya sekolah yang tinggi tidak selalu sebanding dengan kualitas pendidikan yang diterima. Sekolah yang membebankan biaya lebih tinggi tidak selalu menjamin penyediaan sumber daya pendidikan yang lebih baik, seperti fasilitas fisik yang memadai atau kualitas pengajaran yang tinggi.

4. Pertumbuhan Sekolah Swasta: Di beberapa negara, biaya sekolah yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan sekolah-sekolah swasta yang menawarkan pendidikan dengan biaya yang lebih tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan polarisasi dalam sistem pendidikan antara sekolah negeri yang melayani masyarakat luas dengan biaya yang lebih rendah, dan sekolah swasta yang lebih eksklusif dengan biaya yang lebih tinggi

5. Pengaruh Kebijakan Pendidikan: Kebijakan pendidikan yang tidak memadai atau tidak tepat dapat memperburuk masalah biaya sekolah. Misalnya, kebijakan yang mengurangi subsidi atau bantuan pendidikan dapat meningkatkan beban biaya sekolah bagi keluarga siswa

6. Dampak Sosial dan Ekonomi: Biaya sekolah yang tinggi dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas, termasuk menghambat mobilitas sosial, memperburuk kesenjangan sosial, dan mengurangi akses pendidikan bagi kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak dari keluarga miskin atau minoritas

7. Pemantauan dan Regulasi: Kurangnya pemantauan dan regulasi terhadap biaya sekolah dapat menyebabkan praktik-praktik yang tidak adil atau tidak transparan dalam penentuan biaya pendidikan. Regulasi yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa biaya sekolah yang dibebankan kepada orang tua siswa adalah wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Untuk mengatasi permasalahan makro terkait biaya sekolah, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk meningkatkan anggaran pendidikan, meningkatkan aksesibilitas pendidikan gratis atau subsidi biaya bagi keluarga yang membutuhkan, serta memperkuat regulasi dan pemantauan terhadap biaya sekolah untuk memastikan bahwa pendidikan yang berkualitas dapat diakses secara adil oleh semua anak.

Mikro

Di Kabupaten Mimika, Papua, permasalahan biaya sekolah yang tinggi dapat menjadi hal yang signifikan mengingat kondisi ekonomi dan geografisnya yang khas. Beberapa permasalahan terkait biaya sekolah yang mahal di Kabupaten Mimika dapat mencakup:

1. Keterbatasan Ekonomi Keluarga: Sebagian besar penduduk Kabupaten Mimika hidup di daerah pedesaan dengan ekonomi yang terbatas. Biaya sekolah yang tinggi, termasuk biaya pendidikan tambahan seperti buku-buku, seragam, dan biaya transportasi, bisa menjadi beban yang berat bagi keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah.

2. Ketersediaan Infrastruktur Pendidikan: Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Mimika, masih ada kekurangan dalam hal jumlah dan kualitas ruang kelas, fasilitas sanitasi, serta aksesibilitas terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

3. Biaya Hidup yang Tinggi: Biaya hidup yang relatif tinggi di daerah seperti Kabupaten Mimika dapat menyebabkan biaya sekolah juga meningkat. Hal ini mencakup biaya makanan, akomodasi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keluarga untuk membayar biaya pendidikan.

4. Ketersediaan dan Kualitas Guru: Kabupaten Mimika mungkin menghadapi tantangan dalam menarik dan mempertahankan guru-guru berkualitas. Ketersediaan guru yang terlatih dengan baik dapat mempengaruhi biaya operasional sekolah.

5. Akses Pendidikan untuk Kelompok Rentan: Anak-anak dari keluarga miskin, kelompok minoritas, atau anak-anak dengan kebutuhan khusus mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas jika biaya sekolah terlalu tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan ketimpangan dalam akses pendidikan di antara berbagai kelompok masyarakat.

6. Pemantauan dan Pengawasan Biaya: Transparansi dalam penggunaan biaya sekolah dan pengawasan terhadap praktik-praktik yang memungut biaya tambahan dari siswa perlu diperkuat.

7. Untuk mengatasi permasalahan biaya sekolah yang tinggi di Kabupaten Mimika, langkah-langkah yang dapat diambil termasuk peningkatan aksesibilitas terhadap pendidikan gratis atau subsidi biaya pendidikan bagi keluarga yang membutuhkan, meningkatkan infrastruktur pendidikan, serta memberikan dukungan yang lebih besar bagi guru dan sekolah di daerah tersebut. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan menyeluruh terhadap masalah ini.

III. ISU STRATEGIS

ISU GLOBAL:

1. Keterbatasan Anggaran Pemerintah: Salah satu tantangan utama dalam mengimplementasikan kebijakan sekolah gratis di tingkat global adalah keterbatasan anggaran pemerintah. Meskipun tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan, negara-negara dengan sumber daya terbatas mungkin menghadapi kesulitan dalam menyediakan dana yang cukup untuk mendukung biaya operasional sekolah.

2. Infrastruktur Pendidikan yang Tidak Memadai: Banyak negara, terutama di wilayah pedesaan atau kawasan terpencil, menghadapi tantangan dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai. Ketersediaan ruang kelas, fasilitas sanitasi yang layak, sumber daya belajar seperti buku teks dan teknologi pendukung (seperti akses internet), serta transportasi menuju sekolah bisa menjadi kendala utama dalam menyelenggarakan pendidikan gratis yang efektif.

3. Kualitas Pengajaran dan Pelatihan Guru: Kebijakan sekolah gratis tidak hanya tentang memastikan akses, tetapi juga tentang memastikan kualitas pendidikan yang diberikan. Pelatihan guru yang memadai dan berkualitas sangat penting untuk meningkatkan standar pengajaran di sekolah-sekolah. Tantangan ini bisa lebih kompleks di negara-negara dengan populasi guru yang besar namun kurang terlatih.

4. Kesetaraan dan Inklusi: Tujuan dari kebijakan sekolah gratis adalah untuk meningkatkan kesetaraan dalam akses pendidikan, termasuk untuk kelompok-kelompok masyarakat yang rentan seperti anak-anak dari keluarga miskin, kelompok minoritas, atau anak-anak dengan disabilitas. Namun, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar inklusif dan memberikan manfaat yang setara bagi semua.

5. Dampak Ekonomi Jangka Panjang: Implementasi kebijakan sekolah gratis dapat memiliki dampak ekonomi jangka panjang, baik positif maupun negatif. Secara positif, pendidikan yang lebih terjangkau dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu negara dan memperkuat basis ekonomi. Namun, ada juga kemungkinan bahwa biaya jangka panjang dari kebijakan ini dapat melebihi manfaatnya jika tidak dikelola dengan baik.

6. Pemantauan dan Evaluasi: Penting untuk memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk memastikan bahwa kebijakan sekolah gratis memberikan dampak yang diinginkan. Evaluasi yang baik dapat membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan area perbaikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di masa depan.

7. Tantangan Global dan Perbedaan Kontekstual: Tantangan dalam implementasi kebijakan sekolah gratis dapat bervariasi secara signifikan antar negara dan wilayah, tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan politik mereka. Oleh karena itu, solusi yang efektif harus disesuaikan dengan situasi lokal dan didukung oleh komitmen politik yang kuat.

8. Mengatasi isu-isu ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta dukungan dari komunitas internasional dan donor untuk membangun kapasitas dan meningkatkan infrastruktur pendidikan di seluruh dunia. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, kebijakan sekolah gratis dapat menjadi salah satu langkah penting dalam memajukan pendidikan global dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

ISU NASIONAL

1. Keterbatasan Anggaran: Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran pemerintah untuk mendukung operasional sekolah gratis di seluruh Indonesia. Meskipun pendidikan dasar dan menengah sudah ditetapkan sebagai hak konstitusional, alokasi anggaran yang memadai sering kali menjadi permasalahan dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan mendukung proses belajar mengajar yang efektif.

2. Infrastruktur Pendidikan: Meskipun ada peningkatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, masih banyak sekolah di Indonesia, terutama di daerah terpencil dan pedesaan, yang menghadapi masalah infrastruktur yang tidak memadai. Ketersediaan ruang kelas, sanitasi yang layak, akses internet, serta peralatan pendukung belajar masih menjadi tantangan dalam menyelenggarakan pendidikan gratis yang berkualitas.

3. Kualitas Pengajaran dan Pelatihan Guru: Kualitas pengajaran dan pelatihan guru adalah faktor kunci dalam meningkatkan standar pendidikan di Indonesia. Masih ada tantangan dalam menyediakan pelatihan yang memadai untuk guru, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu,

perlu juga perhatian khusus dalam meningkatkan motivasi dan kesejahteraan guru untuk memastikan mereka dapat memberikan pengajaran yang bermutu.

4. Kesetaraan dan Inklusi: Meskipun tujuan dari sekolah gratis adalah untuk menciptakan kesetaraan dalam akses pendidikan, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar inklusif dan memberikan manfaat yang setara bagi semua kelompok masyarakat. Anak-anak dari keluarga miskin, kelompok minoritas, dan anak-anak dengan disabilitas sering kali masih menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan dengan baik.

5. Partisipasi dan Dukungan Orang Tua: Dukungan dari orang tua dan keluarga terhadap pendidikan anak sangat penting. Tantangan bisa muncul dalam memastikan partisipasi aktif orang tua dalam mendukung proses pendidikan anak mereka, terutama dalam hal mengatasi tantangan-tantangan seperti biaya tambahan yang terkait dengan pendidikan, meskipun sekolah itu sendiri gratis.

6. Pemantauan dan Evaluasi: Sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif sangat penting untuk memastikan kebijakan sekolah gratis memberikan dampak yang diharapkan. Evaluasi yang baik dapat membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan area perbaikan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini di masa depan.

7. Perubahan Demografis dan Teknologi: Perubahan demografis dan kemajuan teknologi juga mempengaruhi cara pendidikan diselenggarakan dan diakses. Sekolah gratis perlu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ini untuk tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak Indonesia.

8. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, Indonesia dapat memastikan bahwa kebijakan sekolah gratis memberikan manfaat maksimal bagi pendidikan nasional dan mengantarkan anak-anak Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan berkeadilan.

ISU LOKAL

Di Kabupaten Mimika, Papua, biaya Bantuan Operasional Dana Alokasi (BOPDA) untuk pendidikan adalah isu lokal yang penting dan sering kali menimbulkan permasalahan yang perlu diperhatikan. Beberapa isu terkait BOPDA di Kabupaten Mimika dapat mencakup:

1. Keterbatasan Anggaran: Kabupaten Mimika, seperti banyak daerah lain di Indonesia, mungkin mengalami keterbatasan anggaran untuk mengalokasikan dana BOPDA secara memadai. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan sekolah untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka, termasuk untuk gaji guru, bahan ajar, dan pemeliharaan fasilitas.
2. Alokasi Dana yang Tidak Merata: Tantangan lainnya adalah distribusi dana BOPDA yang tidak merata di antara sekolah-sekolah di Kabupaten Mimika. Sekolah-sekolah di daerah terpencil atau terpencil sering kali menghadapi akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya ini dibandingkan dengan sekolah-sekolah di daerah yang lebih terjangkau.
3. Infrastruktur Pendidikan yang Terbatas: Kabupaten Mimika, dengan topografi dan geografi yang beragam, mungkin menghadapi tantangan dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai. Ini termasuk kekurangan ruang kelas, fasilitas sanitasi yang layak, dan akses terhadap teknologi informasi yang merupakan bagian penting dari pembelajaran modern.
4. Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Guru: Tantangan lain adalah memastikan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah di Kabupaten Mimika. Guru-guru mungkin membutuhkan lebih banyak pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka, sementara pengembangan profesional terbatas di daerah terpencil.
5. Inklusi dan Kesetaraan: Penting untuk memastikan bahwa kebijakan BOPDA mendukung inklusi dan kesetaraan akses pendidikan bagi semua anak di Kabupaten Mimika, termasuk anak-anak dari keluarga miskin, kelompok minoritas, dan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Hal ini dapat mencakup dukungan tambahan untuk siswa-siswa yang membutuhkan bantuan khusus.

6. Partisipasi Masyarakat dan Transparansi: Transparansi dalam alokasi dan penggunaan dana BOPDA serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan dana tersebut merupakan faktor kunci dalam memastikan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan pendidikan di Kabupaten Mimika.
7. Kesiapan Menghadapi Perubahan: Kabupaten Mimika juga perlu siap menghadapi perubahan dalam tuntutan pendidikan global dan nasional, termasuk pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran dan adaptasi terhadap kebutuhan pendidikan yang berkembang.
8. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini, baik melalui kerja sama antar pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, Kabupaten Mimika dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan secara signifikan untuk memastikan anak-anak di daerah ini mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan memadai.

IV. METODE PEMBAHARUAN

Metode pembaharuan dana BOPDA mengacu pada upaya untuk memperbaiki atau mengubah pendekatan dalam pengelolaan dan alokasi dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah. Beberapa kondisi awal dan setelah yang dapat menjadi pertimbangan dalam menerapkan metode pembaharuan dana BOPDA termasuk:

Kondisi Awal

1. Evaluasi Kebutuhan: Langkah awal adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pendidikan di wilayah atau daerah yang bersangkutan. Ini meliputi penilaian terhadap kondisi infrastruktur pendidikan, kualitas pengajaran, dan kebutuhan lain yang mungkin tidak terpenuhi.

2. Transparansi dan Akuntabilitas: Penting untuk memastikan bahwa proses alokasi dana BOPDA dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Ini melibatkan penyediaan informasi yang jelas kepada semua pemangku kepentingan terkait penggunaan dana, serta mekanisme untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas penggunaan dana tersebut.

3. Perencanaan Strategis: Metode pembaharuan dana BOPDA memerlukan perencanaan strategis yang matang. Ini mencakup penetapan tujuan jangka panjang dan pendekatan yang dapat diukur untuk meningkatkan akses, kualitas, dan kesetaraan dalam Pendidikan

Kondisi Setelah

1. Penyediaan Pendidikan yang Lebih Merata: Metode pembaharuan diharapkan dapat menghasilkan distribusi dana BOPDA yang lebih merata dan adil di antara berbagai sekolah atau wilayah. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah yang kaya dan miskin.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan: Dengan pengelolaan dana yang lebih efektif dan strategis, metode pembaharuan diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Ini termasuk pengembangan kurikulum yang relevan, pelatihan guru yang lebih baik, dan perbaikan fasilitas sekolah.

3. Transparansi dan Akuntabilitas yang Lebih Baik: Setelah pembaharuan, diharapkan ada peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOPDA. Ini meliputi penyediaan laporan yang jelas tentang penggunaan dana kepada publik, serta mekanisme yang lebih kuat untuk pemantauan dan evaluasi.

V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN

Sebelum adanya Inovasi :

- Penambahan Sumber Daya Keuangan: Sebelum adanya BOPDA, kemungkinan sumber daya keuangan untuk pendidikan di Kabupaten Timika mungkin terbatas atau tidak mencukupi. Dengan adanya BOPDA, terjadi penambahan dana yang dapat dialokasikan secara khusus untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, mendukung kegiatan pembelajaran, atau meningkatkan kualitas pengajaran.

- Pengembangan Kualitas Pengajaran: Sebelum adanya BOPDA, pendidikan mungkin menghadapi tantangan dalam hal pengembangan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Dengan adanya dana BOPDA, sekolah dapat memanfaatkannya untuk pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang lebih relevan, dan pengadaan sumber daya pendidikan lainnya yang diperlukan.

Setelah adanya Inovasi :

- Mendorong Inovasi Pendidikan: Dana BOPDA dapat menjadi dorongan untuk mendorong inovasi dalam pendidikan seperti pengembangan program ekstrakurikuler yang beragam, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, atau pengembangan kreativitas siswa.

- Perbaikan Infrastruktur Pendidikan: Dana BOPDA dapat dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur fisik sekolah, seperti gedung kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas sanitasi yang lebih baik. Hal ini akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan kondusif bagi siswa dan tenaga pendidik.

VI. CARA KERJA INOVASI

1. Sekolah Swasta dan Negeri mengajukan Proposal kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika

2. Pengumpulan data jumlah siswa dari sekolah negeri dan swasta

3. Dinas Pendidikan memverifasi data yang diberikan

4. Setelah data diverifikasi dan dinyatakan benar maka dilakukan pencairan dana ke rekening sekolah

5. Sekolah mengelola dana BOPDA sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan sekolah

6. Sekolah melakukan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika

1.11 Tujuan Inovasi Daerah

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan: Salah satu tujuan utama dari inovasi BOPDA adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan di sekolah-sekolah. Ini dapat mencakup peningkatan kualitas pengajaran, pengembangan kurikulum yang lebih relevan, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, dan peningkatan fasilitas pendidikan.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Inovasi BOPDA dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia, termasuk guru dan staf pendidikan lainnya. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang terfokus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.

1.12 Manfaat yang Diperoleh

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan: Salah satu manfaat utama dari inovasi BOPDA adalah peningkatan kualitas pendidikan. Dana BOPDA yang dielola dengan baik dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pengajaran, mengembangkan kurikulum yang lebih relevan, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperkenalkan metode pembelajaran yang inovatif.
2. Pengembangan Teknologi Pendidikan: Inovasi BOPDA dapat mendorong pengembangan teknologi pendidikan yang lebih maju. Hal ini mencakup penggunaan platform e-learning, aplikasi pendidikan, dan teknologi lainnya yang mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif.
3. Mendorong Inovasi Kurikulum: Dana BOPDA dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan global. Ini mencakup integrasi materi yang relevan dengan kemajuan teknologi
4. Pengurangan Kesempatan Belajar Tertinggal: Dengan dana BOPDA yang digunakan secara efektif untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kualitas pendidikan, inovasi ini dapat membantu mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah yang kaya dan miskin dalam kesempatan belajar.

1.13 Hasil Inovasi

1. Peningkatan Kualitas Fasilitas Sekolah: Dana BOPDA dapat digunakan untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur fisik sekolah, seperti gedung kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas sanitasi. Hal ini akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan kondusif bagi siswa dan guru.
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan: Inovasi BOPDA membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung proses belajar mengajar. Termasuk di dalamnya adalah pengadaan peralatan pembelajaran, komputer, akses internet, dan teknologi pendukung lainnya yang memperkaya pengalaman belajar siswa.
3. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran: Dana BOPDA dapat digunakan untuk pelatihan guru dan pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Ini membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah di Timika, sehingga meningkatkan pemahaman dan prestasi akademik siswa.
4. Mendorong Inovasi Teknologi Pendidikan: Inovasi BOPDA dapat mendorong penggunaan teknologi pendidikan yang lebih maju di sekolah-sekolah. Hal ini termasuk pengembangan platform e-learning, aplikasi pendidikan, dan integrasi teknologi digital dalam proses pembelajaran, yang dapat meningkatkan interaktivitas dan efisiensi belajar siswa.
5. Meningkatkan Akses Pendidikan: Dana BOPDA dapat digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil atau dengan akses terbatas sebelumnya. Ini termasuk mendukung biaya transportasi siswa, memberikan bantuan buku dan perlengkapan sekolah, serta program-program pendidikan yang dapat menjangkau lebih banyak siswa.
6. Pengembangan Kapasitas Manajerial dan Administratif: Inovasi BOPDA juga dapat memperkuat kapasitas manajerial dan administratif di sekolah-sekolah, termasuk dalam perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Hal ini penting untuk memastikan penggunaan dana BOPDA yang efektif dan efisien.

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
1	Regulasi Inovasi Daerah*	Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Daerah	• **Tentang** Penetapan Inovasi Daerah
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*	Lebih dari 30	• **Tentang** Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Pada Satuan Pendidikan Paud / TK / Raudathul Alfal, Sekolah Dasar / Madrasah Iptidaiyah, SMP / Madrasah Tsanawiyah, SMA / Madrasah Aliyah, dan Kesetaraan Tahun Anggaran 2023

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
3	Dukungan anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T1 dan T-2	
4	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	• **Tentang** Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2023 • **Tentang** Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023 • **Tentang** Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025
5	Pelaksana inovasi daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	
6	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	• **Tentang** https://www.pojokpapua.id/2024/02/06/bupati-mimika-gratiskan-biaya-sekolah-sd-sampai-sma/
7	Pedoman teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	• **Tentang** https://jdih.mimikakab.go.id/dokumen/view?id=3435 • **Tentang** Pedoman Teknis BOPDA Tahun 2023 • **Tentang** Pedoman Teknis BOPDA Tahun 2024
8	Kecepatan penciptaan inovasi*	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	• **Tentang** Proposal Inovasi BOS DAMI
9	Kemanfaatan inovasi*	Cakupan penerima manfaat 201 orang atau lebih	• **Tentang** Daftar Penerima BOPDA Tahun 2023 • **Tentang** Daftar Penerima BOPDA Tahun 2024
10	Kemudahan informasi layanan	Layanan melalui 2 dari 4 media	• **Tentang** Kantor Dinas Pendidikan • **Tentang** https://www.pendidikanmimika.org/
11	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	• **Tentang** Proposal BOS DAMI

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
12	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik Contoh : tatap muka/jemput bola/noken	
13	Kualitas inovasi daerah*	Memenuhi 5 unsur substansi	